



2008:

Perjalanan dimulai tahun ini, ketika Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mulai mengkaji kebutuhan perundang-undangan terkait perampasan aset dari hasil tindak pidana.



2012:

Setelah melakukan kajian selama beberapa tahun, pada tahun 2012, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana resmi diajukan ke DPR RI untuk dimasukkan dalam legislasi nasional.



2014-2023:

Mandek di DPR Selama bertahun-tahun, RUU ini mengalami berbagai penundaan. Meskipun sudah diajukan pada 2012, RUU Perampasan Aset tidak kunjung dibahas serius oleh DPR RI.



Agustus 2024:

Pada 27 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun buka suara terkait RUU Perampasan Aset. Dia menekankan pentingnya pembahasan RUU Perampasan Aset.



Oktober 2024:

Baleg DPR RI periode 2024-2029 mengadakan rapat untuk membahas evaluasi Prolegnas dan usulan RUU untuk periode 2025-2029. Dalam rapat tersebut, RUU Perampasan Aset tidak ada di dalam daftar RUU usulan DPR yang masuk ke Program Legislasi nasional (Prolegnas).



November 2024:

Hingga akhirnya, dalam rapat Baleg bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada 18 November 2024, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana masuk dalam Prolegnas jangka menengah 2025-2029.

MOMENTUM PERCEPAT RUU PERAMPASAN ASET

Demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah bekalgan ini membawa beberapa tuntutan kuat. Mulai terkait besarnya gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI, hingga tuntutan untuk segera disahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Tuntutan itu dibawa dalam aksi besar di Jakarta yang dilakukan para buruh pada 28 Agustus 2025 kemarin. Kemudian, aksi yang dilakukan ribuan massa yang mengatasnamakan Aliansi Lampung Melawan (ALM) di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (1/9/2025), juga menuntut disahkannya RUU Perampasan Aset. Tuntutan ini adalah salah satu dari 11 tuntutan mereka. Selain itu, tuntutan perampasan aset koruptor juga menjadi salah satu dalam tuntutan 17+8 yang viral di media sosial belakangan ini. Situasi dan juga kondisi saat ini dinilai sebagai momentum tepat untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset yang selama bertahun-tahun hanya menjadi wacana politik tanpa ketegasan nyata. Padahal masyarakat menilai keberadaannya sangat vital untuk memangkas akar-akar kejahatan ekonomi yang membiayai berbagai kerusakan dan praktik mafia. Merespons aspirasi dari masyarakat yang ingin pembahasan RUU tersebut dipercepat, maka Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan DPR akan memaksimalkan pembahasannya. Meski demikian, RUU Perampasan Aset harus dirancang secara hati-hati karena menyangkut urusan pidana.

BACA HAL 11...

**SEGERA! BUAT
UU PERAMPASAN ASET NEGARA
DARI KORUPTOR**



MENDAGRI MINTA KEPALA DAERAH TAK PESTA, KE LUAR NEGERI, DAN FLEXING

JAKARTA (Lentera) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meminta seluruh kepala daerah dan kementeriannya tidak lakukan pesta dan pamer. Diantaranya adalah menunda acara seremonial yang terkesan pemborosan, flexing barang mewah, hingga perjalanan ke luar negeri.

Hal itu disampaikan Tito dalam rapat koordinasi pengen-dalian inflasi 2025 bersama seluruh kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) yang disiarkan secara daring, Selasa (2/9/2025).

"Menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan. Apalagi dengan musik-musik seperti pesta di tengah situasi seperti ini sangat sensitif, rekan-rekan," ucap Tito.

Tito meminta agar kegiatan daerah, termasuk ulang tahun daerah, digelar secara sederhana. "Jadi, baik hari ulang tahun daerah, ataupun kegiatan seremonial kedinasan lainnya, itu dilakukan dengan cara yang sederhana," ujar dia.

Lebih lanjut Tito menyarankan agar kepala daerah mengubah acara seremonial menjadi kegiatan bermanfaat. "Tumpengan, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, kepada masyarakat yang kurang mampu, itu jauh di tengah situasi ini lebih bermanfaat," lanjut dia.

Tito khawatir jika kegiatan daerah yang terkesan mewah digelar justru menjadi tidak sensitif dengan situasi saat ini. "Nanti kalau pesta-pesta, ada musik-musiknya, dipotong, dibuat TikTok, dan lain-lain, kemudian dibandingkan dengan masyarakat yang lagi menuntut sikap low profile para pejabat," kata dia.

Dia juga khawatir hal ini disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab. "Nanti akan menimbulkan amunisi baru yang bisa digoreng oleh siapapun yang ingin situasi tidak baik," ucap Tito.

Tito meminta para pejabat untuk peka dengan kondisi masyarakat dan tidak menggelar kegiatan yang terkesan pemborosan demi menjaga perasaan dan kepercayaan publik, khususnya ketika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah

menggencarkan efisiensi di berbagai bidang.

Tidak hanya soal dinas, Mendagri juga mengingatkan kepada para pejabat daerah beserta keluarganya untuk tidak flexing atau pamer kemewahan. Lebih lanjut Mendagri juga menginstruksikan agar acara pribadi juga dilaksanakan secara sederhana, baik untuk saat ini dan untuk ke depan.

"Juga flexing kemewahan untuk pejabat maupun keluarga, tolong dijaga betul, termasuk acara pribadi di momentum saat ini dan ke depan, laksanakan secara sederhana," tuturnya.

Selain itu, ia juga meminta pejabat menunda perjalanan ke luar negeri hingga situasi kembali kondusif.

"Kalau ada permintaan izin keberangkatan ke luar negeri, mohon maaf, kami tunda dulu sampai situasinya kondusif," pungkas Tito.

"Tunda semua keberangkatan ke luar negeri. Kemendagri kalau ada permintaan izin keberangkatan ke luar negeri mohon maaf untuk sekarang kami tunda dulu sampai situasinya nanti kondusif," kata Tito dalam arahannya.

Tito juga meminta semua kepala daerah untuk berada di daerahnya masing-masing dalam situasi rawan saat ini.

"Jangan tinggalkan [daerah], kendalikan situasi bersama Forkopimda karena kalau kepala daerahnya enggak ada nanti akan kehilangan induk siapa yang mengendalikan. TNI dan Polri juga mengharap kepala daerah ada di tempat," jelas Tito.

Tito mengatakan kepala daerah dan anggota DPRD harus harus mengajukan izin kepada Kementerian Dalam Negeri apabila hendak melakukan perjalanan keluar negeri. Meski demikian, Tito menegaskan tidak akan mengeluarkan izin tersebut untuk sementara waktu.



"Biasanya juga nanti akan ada izin dari Kementerian Dalam Negeri bagi kepala daerah dan DPRD, semua saya tunda," ujarnya.

Tito juga menginstruksikan kepada kepala daerah yang wilayahnya masih dianggap rawan untuk segera mengendalikan situasi di daerahnya masing-masing dan berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Semua kepala daerah, (yang daerahnya) dalam kondisi yang kita anggap penilaian nasional atau penilaian daerah masing-masing dianggap masih rawan, kepala daerahnya harus ada di tempat, mengendalikan situasi bersama dengan forkopimda," ujarnya.

Mendagri juga mengingatkan kepada seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera melanjutkan aktivitas perekonomian setelah aksi unjuk rasa mereda. "Jangan kemudian kegiatan ekonomi yang terhenti, karena semua masyarakat akan terdampak," kata Tito.

Ia menginstruksikan seluruh Pemda untuk mengambil inisiatif mendorong roda perekonomian daerahnya masing-masing. Ia juga menegaskan kegiatan perekonomian harus kembali seperti sedia kala, karena kehidupan masyarakat sangat bergantung pada pulihnya roda perekonomian.

"Kegiatan ekonomi kita dorong, semua daerah mendorong kegiatan ekonomi tetap berjalan. Harus berjalan seperti biasa, karena ini menyangkut kepentingan publik, masyarakat," ujarnya.

Dalam rangka pemulihan aktivitas perekonomian daerah, Mendagri juga mendorong daerah untuk segera memperbaiki fasilitas umum yang rusak akibat tindakan anarkistis pihak yang tidak bertanggung jawab. Pasalnya fasilitas umum tersebut juga merupakan penunjang aktivitas perekonomian.

Mendagri menjelaskan, perbaikan kerusakan dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, sumber pembiayaan juga bisa berasal dari gotong royong, misalnya bantuan dari masyarakat yang mampu.

"Kalau nanti APBD-nya kesulitan, ya bisa melalui mekanisme hibah. Misalnya hibah dari pemerintah provinsi, dari kabupaten lain yang lebih mampu anggaran fiskalnya kuat," ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah pusat juga tidak menutup kemungkinan turut membiayai perbaikan tersebut. Saat ini pemerintah masih berkoordinasi untuk memetakan daerah mana yang bisa memperbaiki secara mandiri dan mana yang memerlukan bantuan, termasuk menghitung total kerugian secara nasional. (day,ant,ist/lut)

“

Menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan. Apalagi dengan musik-musik seperti pesta di tengah situasi seperti ini sangat sensitif, rekan-rekan,"

TITO KARNAVIAN,
Menteri Dalam Negeri RI

BALEG DPR RI AKAN DALAMI **SKEMA BPJS UNTUK PRT**

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan mandali skema masuknya Pekerja Rumah Tangga (RPT) sebagai penerima program jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan. Untuk itu Baleg berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Rencana ini mencuat dalam rapat pembahasan RUU terkait Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) di DPR RI. Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung menekankan pentingnya mendengar penjelasan langsung dari kedua lembaga tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam perumusan kebijakan terkait penyusunan RUU PPRT.

"Sebaiknya kita (melakukan) RDPU dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan supaya kita tidak salah. Jadi ini kita sepakati, kita dengar di RDPU dulu. Karena PRT ini kan unik, bukan pekerja formal yang ada di kantor. Jadi saya usul kita RDPU dulu dengan BPJS," ujar Martin saat memimpin Rapat Panja RUU PPRT di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).

Sebelumnya, Anggota Baleg DPR RI Abidin Fikri menyoroti terkait mekanisme kepesertaan PRT dalam program jaminan sosial yang terdapat dalam RUU PPRT terkait hak dan kewajiban PRT.

"Pada poin mendapatkan jaminan sosial kesehatan sebagai penerima bantuan iuran. Ini berarti masuk skema APBN, cukup berhenti di jaminan sosial. Jadi pemberi kerja harus mendaftarkan PRT melalui BPJS secara mandiri," ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

RDPU dengan BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan ini diharapkan dapat menemukan mekanisme yang tepat dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi PRT, mengingat karakteristik pekerjaan mereka yang berbeda dengan pekerja formal kantor.

Sebelumnya, Anggota Baleg, Ledia Hanifa, menyoroti kerancuan skema jaminan sosial dalam RUU PPRT. Menurutnya, pasal-pasal terkait jaminan sosial ini berpotensi sulit diterapkan karena tidak ada kejelasan mengenai kewenangan dan mekanisme bagi pemberi kerja.

Secara khusus, Ledia mengkritik Pasal 15 F, G, dan H yang menyebutkan hak pekerja rumah tangga (PRT) untuk mendapatkan jaminan sosial kesehatan sebagai penerima bantuan iuran (PBI), jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bantuan sosial dari pemerintah pusat.

"Sebagai penerima bantuan iuran bukan kewenangannya pemberi



Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung.

kerja, karena dia masuk DTKS atau enggak, itu agak rumit nanti. Misalnya yang membantu di rumah saya ternyata dia enggak masuk DTKS atau DTSEN. Apakah saya harus mengejar-kemungkinan-kemungkinan sosial supaya masuk?" ujar Ledia Hanifa, Kamis (21/8/2025) lalu.

Ia menjelaskan bahwa status PBI ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), bukan oleh pemberi kerja. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana mekanisme teknis di lapangan akan berjalan.

Selain itu, Ledia juga menyoroti aturan BPJS Kesehatan yang mewajibkan pendaftaran satu keluarga (satu Kartu Keluarga / KK), bukan per individu. Jika seorang PRT memiliki tanggungan keluarga yang banyak, hal ini bisa menjadi beban finansial yang signifikan bagi pemberi kerja.

"Jaminan sosial kesehatan itu enggak bisa bayar cuma yang bekerja di kita, harus satu keluarga, satu KK. Modelnya BPJS Kesehatan itu kan satu KK dibayarnya, nanti terus kalau anaknya ada 10, lumayan juga itu kalau dibayarkan sama pemberi kerjanya. Jadi maksudnya ini perlu ada kejelasan," tegasnya.

Ledia berharap skema jaminan sosial ini diperjelas agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari, baik bagi PRT maupun pemberi kerja. "Ini jadi bagian yang harus dipikirkan oleh kita," tutup di

Sementara itu, Panitia Kerja (Panja) RUU PPRT dinilai tetap menunjukkan komitmen tinggi untuk melanjutkan pembahasan meski di tengah kondisi yang belum sepenuhnya stabil. Sikap tersebut dinilai sebagai bukti DPR tetap mengedepankan kepentingan rakyat.

"Sikap Panja ini membuktikan bahwa DPR RI masih mampu mengedepankan kepentingan rakyat,

khususnya kelompok rentan seperti pekerja rumah tangga, meski dalam kondisi yang penuh tekanan," kata PRT dari Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Sapulidi, Ajeng, melalui keterangan tertulis, Senin (1/9/2025).

Ajeng menyampaikan Ketua Panja RUU PPRT, Martin Manurung (Fraksi Partai NasDem), bersama beberapa anggota Panja lainnya telah memperlihatkan keseriusan dan dedikasi memastikan proses legislasi tetap berlanjut. Meski tugas tersebut di lakukan di tangan tantangan politik dan situasi eksternal sedang tidak mudah.

Perwakilan dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Lita Anggraini, menyampaikan Panja RUU PPRT menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Hal itu sebagai bukti kesungguhan DPR RI menuntaskan salah satu bakal beleid yang sudah puluhan tahun diperjuangkan oleh gerakan masyarakat sipil, aktivis perempuan, dan jaringan advokasi pekerja rumah tangga.

"Pak Martin, Pak Bob Hasan, Pak Sturman dan beberapa anggota Panja menunjukkan dedikasi luar biasa dengan tetap produktif membahas draft RUU PPRT di saat banyak baleg tiarap," kata Lita.

Lita menyampaikan, konsistensi kerja Panja RUU PPRT menjadi harapan. Sebab, masih ada anggota legislatif yang terus bekerja dalam sunyi di tengah hiruk pikuk demonstrasi. Meski demikian Koalisi tetap berharap konsistensi ini tetap terjaga. Sehingga pengesahan UU PPRT bisa segera dilakukan.

Lita juga mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga adalah wujud nyata keadilan sosial, pemenuhan HAM, dan penghormatan atas kerja-kerja perawatan (care work) yang menopang kehidupan bangsa. Pengesahan UU PPRT akan menjadi bagian penyelesaian perekonomian makro di sektor kemiskinan, ketenagakerjaan dan produktifitas kerja nasional.

"RUU PPRT bukan hanya tentang pekerja rumah tangga, tetapi juga tentang masa depan bangsa yang lebih adil, setara, dan berperikemanusiaan," kata perwakilan Institut Sarinah Endang Yuliastuti. (rls,ant,ist/lut)

Sebaiknya kita (melakukan) RDPU dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan supaya kita tidak salah. Jadi ini kita sepakati, kita dengar di RDPU dulu. Karena PRT ini kan unik, bukan pekerja formal yang ada di kantor. Jadi saya usul kita RDPU dulu dengan BPJS,"

MARTIN MANURUNG
Wakil Ketua Baleg DPR RI

DEWAN BURUH SETARA KEMENTERIAN: SOLUSI ATAU JADI BEBAN?

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan segera mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN), sebuah lembaga dengan status setara kementerian maupun lembaga negara. Ekonom mengungkapkan beberapa kekhawatiran: jadi musuh para pengusaha hingga beban baru anggaran negara.

Rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) dikritisi oleh Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. Trubus menilai DKBN yang rencananya akan setara dengan kementerian dan lembaga negara dan akan mengurus persoalan buruh di Tanah Air tersebut bakal menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Menurut Trubus apabila semua persoalan dibentuk kementerian maupun lembaga dan ditanggung oleh negara maka hal ini akan berpotensi untuk membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sekarang sudah ada 49 kementerian ada beberapa badan dan lembaga juga yang ditambah. Ini jadi gemuk sekali nantinya. Kalau semua urusan diurus negara dan dibebani ke APBN, jadinya nggak efektif atau belum tentu efektif," kata Trubus, Selasa (2/9/2025).

Trubus melanjutkan, jika Presiden Prabowo hanya ingin membereskan persoalan buruh maka bisa melakukan banyak komunikasi dengan asosiasi buruh hingga pengusaha. Pasalnya, sudah banyak asosiasi buruh dan pengusaha yang ada di Indonesia.

"Organisasi buruh itu kan sudah banyak, saya khawatir akan saling bersaing, yang satu dilindungi negara dan satu lagi hanya dilindungi lembaga pembela buruh. Ini lebih kepada kepentingan sektoral saja," tambahnya.

Trubus juga menyebut, badan seperti DKBN akan dihilangkan pemimpin selanjutnya. Tak jarang, di banyak era kepemimpinan presiden terkadang melakukan efisiensi kementerian/lembaga.

"Nanti badan ini nggak jalan, ganti presiden ganti kebijakan. Dulu era Presiden Jokowi [Joko Widodo] banyak yang digabung-gabungin. Sekarang banyak sekali kementerian dan lembaga, badan dan lainnya," pungkas Trubus.

Senada, Center for Strategic and International Studies (CSIS) mewanti-wanti pemerintah agar tidak menjadikan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) sebagai musuh para pengusaha. Peringatan ini diungkapkan Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri, menyusul diumumkan rencana pembentukan serta pengumuman struktur DKBN, nomenklatur baru



Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, tokoh buruh Jumhur Hidayat, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban saat memberikan keterangan pers usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/9/2025). (Dok. Sekretariat Presiden)

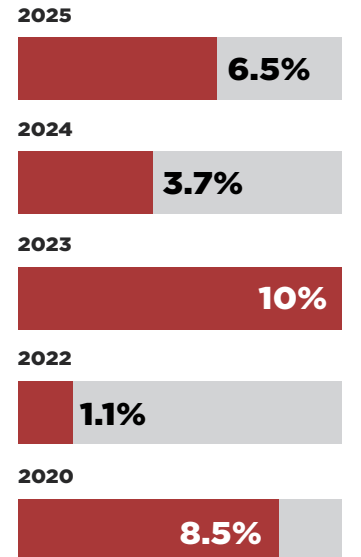
setara dengan kementerian/lembaga oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

"Saat ini banyak kebijakan-kebijakan yang cenderung menganggap bahwa dunia usaha ini sebagai salah satu sumber permasalahan. Padahal, kita ketahui dunia usaha itu adalah pihak yang membuat lapangan

pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu tidak diciptakan oleh pemerintah, tetapi oleh dunia usaha," katanya, dalam Wake up call dari Jalanan: Ujian Demokrasi dan Ekonomi Kita, di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Upah Minimum Regional (UMR) di berbagai daerah di Indonesia memang tergolong cukup rendah. Namun, hal

BESARAN KENAIKAN UMP INDONESIA



ini tidak bisa semata-mata hanya menyalahkan dunia usaha saja.

Upah rendah, kata Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS, Deni Friawan, terjadi karena produktivitas di Indonesia juga masih sangat rendah. Sementara, produktivitas rendah salah satunya didorong oleh surplus tenaga kerja yang sampai saat ini belum mampu diatasi Indonesia. (wid,ist,blo/dya)

Diumumkan 2 Minggu Lagi, 6 Tokoh Buruh Jadi Penasihat

Presiden RI Prabowo Subianto akan umumkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) dalam kurun waktu dua minggu lagi. Nantinya, nomenklatur DKBN dibuat setingkat kementerian/lembaga. Sementara, Satgas Pencegahan PHK akan dibentuk setelahnya.

"Menunggu Bapak Presiden yang akan mengumumkan langsung, Dewan Kesejahteraan Perlindungan (Buruh) Nasional yang membentuk Satgas PHK nantinya. Jadi bukan diumumkan ada dua, Dewan Kesejahteraan Perlindungan Nasional yang membentuk Satgas PHK itu sendiri," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea kepada wartawan di Jakarta, dikutip Selasa (2/9/2025).

Andi Gani mengatakan sebanyak enam tokoh buruh akan masuk dalam struktur DKBN dan akan diumumkan langsung oleh Prabowo. Namun, ia beserta pimpinan lain sepakat untuk mendapat jabatan tinggi.

"Tapi saya tegaskan, saya dan teman-teman menolak menjadi pejabat tinggi negara. Karena memang kami tidak menjadi pejabat," ujarnya.

Presiden Partai Buruh Sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, para pimpinan serikat buruh bisa menjadi penasihat dalam DKBN, namun tidak sebagai pejabat negara.

Said mengatakan, Keputusan Presiden (Keppres) sebagai payung hukum yang mengatur kelembagaan DKBN pun sudah ditandatangani oleh Prabowo.

"Struktur DKBN-nya sudah ditandatangani oleh Presiden dalam bentuk Keppres. Siapa yang mengisinya, belum (ditentukan). Mungkin tadi perkiraan seminggu dua minggu ini (diumumkan)," kata Said.

Sebelumnya, Presiden Prabowo berjanji akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Lembaga ini akan diisi oleh

pimpinan-pimpinan buruh dari seluruh Indonesia serta mengkaji keadaan buruh dan memberi nasihat ke Istana.

"Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh, dan memberi nasihat ke Presiden, mana undang-undang yang tidak melindungi buruh, mana regulasi yang nggak benar, mereka akan memberik masukan kepada saya, nanti akan diperbaiki," kata Prabowo dalam pidato sambutan di acara peringatan Hari Buruh Sedunia yang berlangsung di Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

Prabowo juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Satgas ini perlu dibentuk untuk melindungi buruh dari kesewenang-wenangan pengusaha agar tidak seenaknya melakukan PHK. (wid,ist,rls/ant)

STAF KBRI DI PERU TEWAS, PEMBUNUH BAYARAN MENEMBAKNYA 3 KALI

Berdasarkan laporan media lokal 24 Horas, staf diplomatik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Lima, Zetro Leonardo Purba ditembak tiga kali oleh pembunuh bayaran hanya beberapa meter dari apartemennya di distrik Lince, Peru. Pemerintah meminta Kementerian Luar Negeri Peru dan kepolisian setempat menyelidiki kasus ini hingga tuntas.

Kepolisian Peru menyampaikan belasungkawa atas kematian seorang staf diplomatik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Lima. Melalui pernyataan resmi di akun X, @PoliciaPeru menegaskan bahwa pihaknya segera mengaktifkan Cerco Plan dan memulai investigasi untuk mengidentifikasi serta menangkap pelaku.

"Kami menyesalkan pembunuhan terhadap seorang pekerja diplomatik dari Kedutaan Besar Indonesia di distrik Lince, Lima. Kami segera mengaktifkan rencana Cerco dan memulai penyelidikan untuk mengidentifikasi dan menangkap pihak yang bertanggung jawab. Perlu kami tegaskan bahwa, bertentangan dengan pemberitaan sejumlah media, korban bukanlah Duta Besar Indonesia, melainkan staf diplomatik yang bekerja di kedutaan," demikian pernyataan Kepolisian Peru, Selasa (2/9/2025).

Sebelumnya diberitakan oleh media lokal 24 Horas, diplomat Indonesia itu ditembak tiga kali oleh seorang pembunuh bayaran hanya beberapa meter dari apartemennya di distrik Lince, ibu kota Peru.

Tragedi ini terjadi ketika Zetro, yang menjabat sebagai Penata Kanselera Muda KBRI Lima, baru pulang bersepeda dari kantor KBRI di San Isidro. Sang istri yang menunggu di pintu gedung menjadi saksi mata langsung detik-detik penembakan brutal tersebut. Tempat Kejadian Perkara (TKP) diketahui merupakan kawasan yang ramai orang.

Menurut laporan kepolisian Peru, korban dicegat oleh dua orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor. Tanpa banyak bicara, pelaku melepaskan tiga tembakan, salah satunya mengenai kepala korban.

"Mereka pasti sudah mengintai. Begitu korban sampai di depan kondominium, para pelaku langsung

menembak tiga kali. Salah satunya mengenai kepala dan mengakibatkan kematian," ujar polisi setempat dikutip media Peru.

Korban sempat dilarikan ke Klinik Javier Prado, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka parah.

Komisaris Guivar dari kepolisian distrik Lince menyebut ini adalah kasus pembunuhan pertama yang terjadi di wilayahnya tahun ini.

"Peristiwa dan motif di balik serangan belum diketahui. Namun, kami tidak menutup kemungkinan



Pegawai Kemlu RI di Peru, Zetro Leonardo Purba yang tewas akibat ditembak

adanya motif balas dendam. Berdasarkan rekaman kamera keamanan, para pelaku diduga warga negara asing," katanya kepada Perú Noticias.

Saat ini, investigasi masih berlangsung. Polisi Peru tengah melakukan pendalaman identitas pelaku dan memeriksa kemungkinan keterkaitan dengan jaringan kriminal internasional.

Menurut warga setempat, Zetro disebut bersepeda menjadi rutinitas hariannya untuk pulang-pergi antara rumah dan kantor KBRI. Pihak kepolisian Peru kini memberikan perlindungan penuh kepada istri dan keluarga almarhum yang masih

berada di Lima.

Zetro diketahui berusia sekitar 40 tahun. Ia menjabat sebagai Penata Kanselera Muda di KBRI Lima.

Penata Kanselera Muda adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) fungsional yang tugasnya melaksanakan kegiatan kekansekleraan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan negara. Termasuk penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, dan kepegawaian, untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.

Ia diketahui baru sekitar lima bulan menunaikan tugas di Peru. Sebelum itu, Purba pernah mengabdikan di Konsulat Jenderal RI (KJRI) Melbourne, Australia sebagai Bendahara dan Penata Kerumahtanggaan (BPKRT). (wid,cna,rls/dya)

Jenazah akan Diautopsi di Kota Lima

KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa almarhum staf KBRI Lima, Zetro Leonardo Purba akan diautopsi di ibu kota Peru, Lima sebelum dipulangkan ke tanah air. Zetro meninggal dunia usai ditembak orang tak dikenal, Senin (1/9/2025) malam.

"Jenazah masih harus menjalani autopsi besok untuk proses penyelidikan polisi," ucap Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha merespons pertanyaan wartawan, Selasa (2/9/2025).

Ia menyampaikan bahwa setelah mendapat izin dari pihak kepolisian, barulah pemulasaran jenazah dan proses administrasi kematian oleh otoritas setempat dapat dilakukan.

Judha mengatakan, proses tersebut diperkirakan akan memakan waktu sekitar lima hari kerja.

Mengenai dugaan motif penembakan, Direktur PWNI Kemlu menyatakan bahwa penyelidikan terkait hal tersebut masih

berlangsung.

"Pak Menlu (Sugiono) juga sudah menelepon Menlu Peru (Elmer Schialer) untuk meminta investigasi menyeluruh atas kasus ini," ucap Judha, merujuk pada pernyataan Wamenlu RI Arrmanatha Nasir.

Sementara itu, Wamenlu RI Arrmanatha Nasir menyampaikan bahwa Presiden Peru Dina Boluarte sudah berjanji akan menangkap pelaku penembakan staf KBRI Lima tersebut.

"Presiden Peru telah mengetahui insiden ini dan memberikan perhatian secara personal," kata Wamenlu Tata ditemui usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Selasa.

"Komitmen diberikan oleh Presiden Peru agar investigasi dilakukan secara benar dan agar segera pelakunya ditangkap," ucap dia, menambahkan.

Terpisah, Wamenlu Anis Matta mengatakan tewasnya Zetro Leonardo Purba, mirip peristiwa

perampokan. Anis mengatakan, saat kejadian, korban baru mengambil uang dari ATM.

"Belum ada (info kelanjutan), kecuali bahwa peristiwa beliau baru mengambil uang dari ATM," kata Anis usai rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

"Jadi ini ada mirip perampokan, tetapi kita sedang menunggu hasil laporan akhirnya. Ini baru laporan sementara seperti itu," sambungnya.

Dia mengatakan, dari laporan awal, peristiwa itu merupakan tindakan pembunuhan. Dia menyebut pihaknya akan segera bersurat ke Kemlu Peru untuk mengusut kasus itu.

"Kita mendapatkan laporan ini adalah peristiwa kriminal, tindakan kriminal. Ini adalah pembunuhan. Dan kita akan segera mengirim surat kepada Kemlu Peru untuk segera melakukan investigasi atas kasus pembunuhan itu," jelasnya. (wid,ant,ist/dya))



Aparat kepolisian Peru siaga penuh usai penembakan diplomat RI di Lima, Peru. (ist)

RATUSAN FASILITAS LALIN DI KOTA MALANG RUSAK BUNTUT AKSI MASSA, KERUGIAN CAPAI RP600 JUTA

MALANG-Kericuhan yang terjadi pada Sabtu (30/8/2025) dini hari meninggalkan kerusakan parah pada sejumlah fasilitas lalu lintas milik Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang. Total kerugian ditaksir mencapai Rp600 juta. Dengan kerusakan terparah menimpa Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL) di simpang jalan Hotel Savana.

"Kalau kami hitung, itu bisa jadi sekitar Rp600 jutaan. Yang paling mahal di APIL-nya itu," ujar Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, ditemui di Balai Kota Malang, Selasa (2/9/2025).

Untuk menutup kebutuhan perbaikan, pria yang akrab dengan sapaan Jaya, ini mengaku akan mengajukan anggaran ke Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2025. Ditegaskannya, pengajuan tersebut bersifat mendesak mengingat perbaikan fasilitas lalu lintas sangat penting bagi keselamatan pengguna jalan.

"Kami ajukan. Karena ini penting untuk perbaikan, urgent," tegasnya.

Jaya menjelaskan, kejadian ini

bermula dari aksi demonstrasi di depan Markas Polresta Malang Kota pada Sabtu dini hari. Usai aksi tersebut, menurutnya massa menyebar ke berbagai titik di Kota Malang dan merusak fasilitas umum, termasuk perlengkapan jalan yang dikelola Dishub.

"Perlengkapan jalan itu kan ada yang bersuar dan tidak bersuar. Yang tidak bersuar seperti water barrier, barricade, rambu-rambu dan marka jalan. Sedangkan yang bersuar itu warning light, ATCS, dan traffic light," jelas Jaya.

Dari hasil inventarisir, Jaya menyebutkan kerusakan fasilitas terjadi di sejumlah lokasi. Di simpang Universitas Brawijaya (UB), tercatat 10 unit barricade besi dan 35 unit water barrier rusak dibakar. Di Jalan Bandung, 25 unit water barrier juga mengalami kerusakan serupa.

Tidak hanya itu, satu unit tenda Dishub di Jalan Ijen yang biasa dipakai untuk pos Car Free Day (CFD) juga rusak. Semen-tara di kawasan Jalan Semeru tepatnya di area Patung Rudal, sebanyak 30 barricade besi dan 20

water barrier habis terbakar. Kerusakan lain juga ditemukan di Jalan Tenes, yakni 40 unit barricade.

Selain perlengkapan fisik, enam unit rambu lalu lintas dan satu paket APIL di simpang Hotel Savana mengalami kerusakan berat. Jaya mengatakan, kabel-kabel lampu lalu lintas di lokasi tersebut diputus dan lampu patah sehingga tidak bisa berfungsi.

Akibat kerusakan itu, menurutnya, lampu lalu lintas di simpang Hotel Savana mati hingga Selasa (2/9/2025) kini. Untuk mengurangi risiko kecelakaan, Dishub tengah melakukan pengaturan lalu lintas secara manual dengan memasang rambu pengalihan arus.

"Dari arah Jalan Sarangan tidak diperbolehkan belok kanan langsung ke Jalan Kaliurang. Jadi kami belokkan



Barricade rusak akibat kericuhan di Jalan Soekarno-Hatta (simpang Universitas Brawijaya), Sabtu (30/8/2025). (Santi/Lentera)

dulu ke arah utara dengan harapan bisa berputar di U-turn," katanya. Keterbatasan jumlah personel membuat Dishub mengerahkan petugas bersama-sama dengan sukarelawan pengatur lalu lintas (Supeltas) untuk membantu pengendalian arus kendaraan. (santi/dya)

Atasi Kekeringan di Desa Kromengan PIPANISASI 2,2 KM UNTUK 400 KK AKAN DIBANGUN



(Ilustrasi) PIPANISASI air bersih. (dok. Ist)

MALANG - Pemerintah pusat akan segera membangun jaringan pipanisasi sepanjang 2,2 kilometer di Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Proyek ini ditargetkan mengatasi dampak kekeringan dan memenuhi kebutuhan air bersih 400 kepala keluarga (KK).

Kepala Bidang (Kabid)

Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan pembangunan proyek telah diawali dengan survei lokasi pada Senin (1/9/2025). Menurutnya, survei melibatkan sejumlah pihak, termasuk BPBD Kabupaten Malang.

"Pipanisasi dilakukan oleh BBWS Balai Besar Wilayah Sungai. Sedangkan untuk anggarannya dari Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait," ujar Sadono, Selasa (2/9/2025).

Disebutkannya, survei mencakup beberapa titik. Di antaranya sumber air Nggawung yang terletak di Dusun Nggawung, Desa Karangrejo, Kecamatan Karangploso. Selain itu, peninjauan juga dilakukan pada tandon air yang berada di Desa Kromengan.

"Pipanisasi ini dilaksanakan untuk

pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga sejumlah 400 KK," lanjutnya.

Sadono menjelaskan, pembangunan jaringan pipa sepanjang 2,2 kilometer itu akan menghubungkan sumber air Nggawung dengan dua tandon air di Dusun Balokan, Desa Kromengan. Dengan adanya jaringan tersebut, warga Kromengan diharapkan dapat memperoleh pasokan air bersih yang lebih stabil.

Sebelumnya, BPBD Kabupaten Malang telah melakukan monitoring dan koordinasi guna mengantisipasi dampak kekeringan. Kegiatan tersebut berlangsung sejak Senin (25/8/2025) hingga akhir Agustus 2025, dengan menyoar sejumlah kecamatan yang dinilai rawan kekeringan.

Menurutnya, wilayah yang dipantau antara lain Kecamatan Kalipare, Sumberpucung, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Donomulyo, Pagak, hingga Kecamatan Bantur.

Dari hasil monitoring, BPBD menerima laporan adanya sumur warga yang mulai mengering di Desa Ringinsari, Kecamatan

Sumbermanjing Wetan. "Namun untuk saat ini, kebutuhan air masih aman walaupun perangkat desa menyampaikan ada beberapa laporan dari warga terkait sumur yang sudah mulai mengering," jelas Sadono.

Kondisi sumur mengering tersebut dilaporkan terjadi di Dusun Sidomukti, khususnya RT 21. Selain itu, sejumlah rumah di Desa Ringinsari juga belum terjangkau jaringan pipanisasi air bersih.

"Sesuai laporan perangkat desa, di Desa Ringinsari juga ada penampungan air milik PDAM. Namun ada beberapa RT yang belum ter-cover pipanisasi PDAM, yakni di Dusun Krajan RT 9 dan RT 10," ungkapnya.

Meski demikian, Sadono memastikan belum ada dampak signifikan dari kondisi sumur yang mulai mengering. "Kondisi kekeringan kritis terjadi jika sumber mata air lebih dari 3 kilometer telah mengering. Kalau sudah kering kritis, nantinya akan diadakan gerakan distribusi air kepada warga terdampak," pungkasnya. (Santi/Dya)



Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prevot. (Foto: Anadolu Agency)

Belgia menjadi salah satu negara terbaru yang menyatakan kesiapan untuk mengakui Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB pada September mendatang. Pernyataan tersebut diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Belgia, Maxime Prevot, pada Selasa (2/9/2025).

"Palestina akan diakui oleh Belgia pada sesi PBB dan sanksi tegas akan dijatuhkan kepada Pemerintah Israel," kata Prevot seperti dikutip dari AFP.

Belum diketahui secara detail apa bentuk sanksi bakal dijatuhkan Belgia kepada Pemerintahan Israel.

Rombongan pengakuan Palestina dari Barat menjadi sorotan ketika itu keluar dari Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Juli lalu. Macron menegaskan pengakuan akan disampaikan pada Sidang Majelis Umum PBB 9-23 September di markas PBB di New York.

Kini sudah belasan negara Barat mengikuti jejak yang sudah dilakukan oleh Prancis.

Adapun bagi Belgia pengakuan terhadap Palestina didasari tragedi kemanusiaan di Gaza. Di sana serangan Israel menyebabkan kematian 60 ribu orang dan bencana kelaparan.

"Menghadapi kekerasan yang dilakukan Israel yang melanggar hukum internasional, mengingat kewajiban internasionalnya, termasuk kewajiban untuk mencegah risiko genosida, Belgia harus mengambil keputusan tegas untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Israel dan teroris Hamas," tulis Prevot.

"Ini bukan tentang menghukum rakyat Israel, melainkan tentang memastikan bahwa pemerintahnya menghormati hukum internasional dan humaniter serta mengambil tindakan untuk mencoba mengubah situasi di lapangan," tambahnya.

Prancis Buka Jalan

Diketahui keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengakui negara Palestina menjadi pembuka jalan bagi negara-negara Barat dalam menunjukkan dukungan

serupa di PBB.

Dikutip dari AP News, Senin (1/9/2025), hal itu menempatkan kembali solusi dua negara di pusat perdebatan global untuk mengakhiri konflik di Gaza.

Dalam suratnya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Macron menegaskan pengakuan negara Palestina didasari keyakinan bahwa perdamaian abadi penting bagi keamanan Israel.

Aneksasi Tepi Barat Terancam Dipercepat

OTORITAS di Tel Aviv memperingatkan akan mengambil langkah tegas dengan melakukan aneksasi atau pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat pada Senin (1/9/2025).

Ancaman itu dilontarkan sebagai respons terhadap meningkatnya dukungan internasional untuk pengakuan negara Palestina.

Bahkan untuk mempercepat proses pencaplokan, tiga pejabat Israel mengatakan kepada Reuters bahwa isu ini akan menjadi bagian dari agenda rapat kabinet keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang digelar pekan ini.

Meski demikian, hingga kini belum jelas wilayah mana yang berpotensi dianeksasi.

Beberapa skenario yang muncul adalah kemungkinan mencakup pemukiman Israel, sebagian wilayah strategis seperti Lembah Yordan, atau gabungan keduanya.

Adapun proses aneksasi sendiri tidak bisa dilakukan secara instan.

BELGIA SIAP AKUI PALESTINA DAN BERI SANKSI ISRAEL

Prancis menegaskan pengakuannya terhadap Palestina didasari kemarahan atas krisis kemanusiaan di Gaza. Presiden Emmanuel Macron menolak tuduhan antisemitisme dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sementara Duta Besar AS Charles Kushner juga mengkritik langkah tersebut dengan alasan berisiko memicu ekstremisme. Sebagai protes, pemerintah Prancis memanggil Kushner.

Meski dinilai simbolis, keputusan Macron dipandang signifikan secara diplomatik. Lebih dari 140 negara telah mengakui Palestina, dan kini beberapa negara Barat seperti Inggris, Kanada, Australia, serta Malta berencana meresmikan sikap itu dalam Sidang Umum PBB pada 23 September 2025.

Negara lain seperti Selandia Baru, Finlandia, dan Portugal turut mempertimbangkannya. Analisis

geopolitik Pascal Boniface menilai reaksi keras terhadap pengakuan ini menunjukkan bobot simbolisme politik, sementara analis Muhammad Shehada menyebut langkah tersebut menambah tekanan diplomatik terhadap Israel dan memberi harapan bagi solusi damai. (AFP, AP, ist/nei)

TIMELINE ANEKSASI TEPI BARAT (1967-2025)

-
- **1967** – Tepi Barat direbut dalam Perang Enam Hari, pemukiman Yahudi mulai berdiri.
- **1970-an** – Pembangunan permukiman diperluas oleh pemerintah.
- **1980** – Yerusalem Timur dianeksasi resmi, dikecam PBB.
- **1993** – Perjanjian Oslo memberi otonomi terbatas Palestina, pemukiman tetap bertambah.
- **2004** – ICJ menyatakan tembok pemisah di Tepi Barat ilegal.
- **2017** – AS di bawah Trump akui Yerusalem sebagai ibu kota, munculkan spekulasi aneksasi.
- **2020** – Netanyahu rencanakan mencaplok 30% Tepi Barat, ditunda demi Perjanjian Abraham.
- **2023** – Wacana aneksasi kembali muncul akibat ketegangan di Gaza dan Tepi Barat.
- **2025** – Pemerintah ancam percepat aneksasi bila Barat akui Palestina di PBB.

Lembah Yordan, namun rencana itu dibatalkan demi normalisasi hubungan dengan UEA dan Bahrain lewat Perjanjian Abraham yang dimediasi Donald Trump.

Kini, gertakan seperti itu kembali mengemuka sebagai respons atas keputusan sejumlah negara Barat yang menyatakan dukungan terhadap berdirinya negara Palestina.

Dikutip dari Reuters pada Selasa (2/9/2025), Perancis, Inggris, Australia, dan Kanada termasuk di antara negara Barat yang menyatakan komitmen untuk secara resmi mengakui Palestina dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) September mendatang. (The Times of Israel, Reuters, ist/nei)

Akademisi Ingatkan Risiko Kesehatan **Konsumsi Belut Tiap Hari**

Apakah kamu termasuk sering mengonsumsi belut? Hidangan ini memang bergizi dan kaya protein hewani. Namun, menurut akademisi, jika dikonsumsi berlebihan—terutama setiap hari—belut bisa menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan.

Hal itu disampaikan oleh Dosen Pendidikan Biologi UM Surabaya, Nur Hidayatullah Romadhon. Dalam penjelasannya di laman UM Surabaya, Nur menyebutkan bahwa daging belut memiliki kandungan kolesterol tinggi, sehingga konsumsi yang terlalu sering dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan.

“Belut dikenal sebagai sumber protein yang baik dan kaya akan nutrisi, namun konsumsi belut secara berlebihan, terutama setiap hari, dapat menimbulkan beberapa risiko kesehatan, salah satu risiko utama adalah tingginya kandungan kolesterol dalam daging belut,” ujar Nur.

Nur memaparkan, dalam 100 gram daging belut terkandung sekitar 185 mg kolesterol. Kadar yang tinggi ini dapat meningkatkan kolesterol darah dan memicu penyakit kronis, seperti jantung koroner dan stroke, terutama pada individu yang rentan terhadap gangguan kardiovaskular.

“Dari sudut pandang biologis, penumpukan kolesterol di arteri dapat menyumbat aliran darah, sehingga mengganggu fungsi organ-organ vital tubuh,” jelas Nur. Tak hanya bisa meningkatkan risiko penyakit kronis, Nur juga mengungkapkan bahwa belut adalah hewan yang rentan tercemar logam berat berbahaya dan dapat berisiko bagi kesehatan tubuh.

Belut biasanya hidup di lingkungan berlumpur yang rawan tercemar logam berat, seperti merkuri dan timbal. Dalam kondisi tersebut, belut dapat menyerap racun dari lingkungannya sehingga dagingnya berpotensi terkontaminasi. Konsumsi belut yang telah terpapar logam berat dalam jangka panjang bisa berisiko menimbulkan kerusakan organ vital.

Selain itu, beberapa keunggulan belut untuk tubuh adalah:

Menambah Energi dan Stamina

Karena mengandung nutrisi yang cukup lengkap, belut baik dikonsumsi sebagai lauk pendamping nasi.

Kandungan gizi, terutama protein, yang tinggi bisa menambah energi dan stamina tubuh, sehingga kamu bisa melakukan beragam aktivitas dan tidak cepat lelah.

Memenuhi Kebutuhan Protein Harian

Belut merupakan sumber protein hewani yang baik untuk kesehatan. Apabila dibandingkan dengan ikan, protein yang terkandung di dalam hewan berkulit licin ini tidak jauh berbeda. Dalam setiap 100 gramnya, belut mengandung 18,5 gram protein, sementara ikan mengandung sekitar 19 gram protein.

Mengonsumsi ikan, belut, ayam, atau daging, bisa membantu memenuhi kebutuhan protein harian. Ingat ya, protein termasuk nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah besar agar tubuh sehat dan semua organ tubuh bisa berfungsi dengan baik.

Menguatkan Daya Tahan Tubuh

Kandungan protein, selenium, zinc, vitamin A, vitamin D, dan vitamin E di dalam belut sangat baik untuk meningkatkan imunitas tubuh, lho. Dengan daya tahan tubuh yang kuat, kamu akan terhindar dari infeksi bakteri atau virus sehingga nggak mudah sakit.

Menjaga Kesehatan Mata

Belut termasuk salah satu sumber vitamin A yang paling baik. Dalam tiap 100 gramnya,

hewan ini mengandung sekitar 3500 IU vitamin A. Kandungan ini justru lebih tinggi dari buah tomat dan jambu biji yang digadang-gadang sebagai buah kaya vitamin A.

Selain untuk meningkatkan daya tahan tubuh, vitamin A juga dibutuhkan untuk menjaga kesehatan mata. Dengan tercukupinya asupan vitamin A, mata bisa lebih sehat dan terhindar dari berbagai penyakit, seperti rabun senja dan penyakit retina.

Memperkuat Tulang dan Gigi

Kandungan vitamin D, protein, kalsium, dan fosfor di dalam belut bermanfaat untuk memperkuat tulang dan gigi. Memenuhi kebutuhan beragam nutrisi tersebut bisa menurunkan risiko terjadinya osteoporosis dan gigi berlubang.

Selain dengan mengonsumsi makanan yang bergizi, kamu juga perlu rutin olahraga agar tulang dan sendi senantiasa kuat.

Mencegah Anemia

Manfaat belut selanjutnya adalah mencegah anemia. Manfaat ini diperoleh dari kandungan asam folat, zat besi, dan vitamin B12 yang

terkandung di dalamnya. Aneka nutrisi tersebut berperan penting untuk menghasilkan sel-sel darah merah. Jadi, dengan jumlah darah yang cukup, tubuh pun akan terhindar dari anemia atau kurang darah.

Meningkatkan Daya Ingat

Sama seperti ikan, belut juga mengandung omega-3, kolin, serta aneka vitamin dan mineral. Selain baik untuk menjaga kesehatan jantung, berbagai nutrisi tersebut juga bisa memelihara fungsi otak, melancarkan aliran darah di otak, meningkatkan daya ingat, serta mencegah pikun atau demensia.

Cara Konsumsi Belut

Berikut beberapa tips mengonsumsi belut agar manfaatnya bisa dirasakan dengan maksimal dan risikonya bisa ditekankan.

Belut sebaiknya disajikan dengan cara dibakar, dikukus, atau direbus agar lebih sehat, serta dipadukan dengan makanan pendamping tinggi serat seperti sayuran atau kacang-kacangan. Konsumsinya pun perlu dibatasi dalam porsi yang wajar, yakni sekitar 40–50 gram untuk sekali saji. Frekuensi konsumsi belut yang dianjurkan adalah 2–3 kali dalam satu hingga dua bulan, sehingga manfaatnya bisa diperoleh tanpa menimbulkan risiko berlebihan. (nei,ist/dya)



Uji Tikus Berhasil, Vaksin mRNA Jadi Terobosan Kanker

Tim peneliti dari Universitas Florida berhasil mengembangkan vaksin berbasis messenger RNA (mRNA) atau RNA duta untuk melawan tumor, yang telah diuji coba pada tikus dengan hasil positif.

"Menunggu Bapak Presiden yang akan mengumumkan langsung, Dewan Kesejahteraan Perlindungan (Buruh) Nasional yang membentuk Satgas PHK nantinya. Jadi bukan diumumkan ada dua, Dewan Kesejahteraan Perlindungan Nasional yang membentuk Satgas PHK itu sendiri," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea kepada

wartawan di Jakarta, dikutip Selasa (2/9/2025).

Andi Gani mengatakan sebanyak enam tokoh buruh akan masuk dalam struktur DKBN dan akan diumumkan langsung oleh Prabowo. Namun, ia beserta pimpinan lain sepakat untuk mendapat jabatan tinggi.

"Tapi saya tegaskan, saya dan teman-teman menolak menjadi pejabat tinggi negara. Karena memang kami tidak menjadi pejabat," ujarnya.

Presiden Partai Buruh Sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, para pimpinan serikat buruh bisa menjadi penasihat dalam DKBN, namun tidak sebagai pejabat negara.

Said mengatakan, Keputusan Presiden (Keppres) sebagai payung hukum yang mengatur kelembagaan DKBN pun sudah ditandatangani oleh Prabowo.

"Struktur DKBN-nya sudah ditandatangani oleh Presiden dalam bentuk Keppres. Siapa yang mengisinya, belum (ditentukan). Mungkin tadi perkiraan seminggu dua minggu ini (diumumkan)," kata Said.

Sebelumnya, Presiden Prabowo berjanji akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Lembaga ini akan diisi oleh pimpinan-pimpinan

buruh dari seluruh Indonesia serta mengkaji keadaan buruh dan memberi nasihat ke Istana.

"Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh, dan memberi nasihat ke Presiden, mana undang-undang yang tidak melindungi buruh, mana regulasi yang nggak benar, mereka akan memberikan masukan kepada saya, nanti akan diperbaiki," kata Prabowo dalam

pidato sambutan di acara peringatan Hari Buruh Sedunia yang berlangsung di Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

Prabowo juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Satgas ini perlu dibentuk untuk melindungi buruh dari kesewenang-wenangan pengusaha agar tidak seenaknya melakukan PHK.

"Kita akan segera membentuk satuan tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan pekerja-pekerja kita di PHK seenaknya," ujarnya. (wid,ist,rls/ant)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL.

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

MEDIA TERVERIFIKASI

Rahasia Cuci Baju Thrifting Jadi Baru dan Higienis

Berbelanja pakaian bekas atau thrifting kini menjadi tren yang banyak digemari. Selain harganya ramah kantong dan modelnya beragam, aktivitas ini juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Meski begitu, perlu diingat bahwa pakaian thrift merupakan barang bekas yang bisa jadi sudah lama tersimpan atau berpindah pemilik tanpa melalui proses pembersihan yang memadai.

Oleh karena itu, mencuci pakaian thrift sebelum digunakan adalah langkah krusial. Ini bertujuan untuk menghilangkan potensi jamur, bakteri, tungau, bau apek, dan sisa kotoran dari pemilik sebelumnya, serta mencegah iritasi kulit yang tidak diinginkan. Proses pencucian baju thrift tidak bisa disamakan dengan mencuci pakaian biasa.

Diperlukan perawatan khusus agar pakaian tetap bersih, higienis, dan tahan lama. Artikel ini akan menjelaskan tahapan penting dalam merawat baju thrifting favorit Anda, sehingga siap digunakan dengan aman dan nyaman.

Persiapan Sebelum Mencuci

Langkah awal mencuci baju thrifting adalah memeriksa label perawatan untuk mengetahui cara mencuci, suhu air, jenis detergen, serta larangan tertentu. Jika label hilang atau tidak terbaca, gunakan pakaian berbahan serupa sebagai acuan.

Sebelum mencuci, pisahkan pakaian berdasarkan warna (terang dan gelap) serta jenis bahan (katun, wol, sutra, dll.). Memisahkan pakaian akan mencegah warna luntur dan kerusakan bahan selama proses pencucian. Selain itu, pisahkan pakaian thrift dari cucian Anda yang lain untuk mencegah penyebaran kuman, bakteri, atau bau tidak sedap yang mungkin menempel.

Disinfeksi dan Penghilang Bau

Pakaian thrift seringkali memiliki bau apek dari penyimpanan lama atau mengandung kuman dan bakteri. Untuk disinfeksi dan menghilangkan bau, Anda bisa merendam pakaian dalam air panas selama 10-15 menit, bahkan beberapa sumber menyarankan 15-30 menit. Air hangat lebih efektif dalam membunuh bakteri dan kuman, namun perhatikan jenis kain karena tidak semua bahan tahan air panas; jika label melarang, gunakan

air hangat dengan durasi perendaman yang lebih lama.

Selesai direndam dengan air panas, bisa melanjutkan dengan perendaman baju pada cairan antiseptik selama 5 hingga 10 menit. Penggunaan cairan antiseptik dapat lebih optimal membunuh kuman yang tersisa, memastikan pakaian benar-benar higienis sebelum digunakan.

Cuka putih ampuh menetralkan bau dan membunuh bakteri, bisa ditambahkan saat bilasan atau digunakan untuk merendam pakaian thrift. Baking soda efektif menghilangkan bau apek dan jamur pada kain keras, sedangkan steamer dengan air suling cocok untuk kain halus karena dapat mensterilkan, menghilangkan bau, serta merapikan kerutan.

Metode Utama Mencuci

Mencuci pakaian thrift dengan tangan lebih aman, terutama untuk bahan halus, vintage, atau tanpa label. Rendam dalam air dingin atau hangat dengan detergen selama 10-15 menit, lalu gosok lembut dan bilas hingga bersih untuk menghilangkan noda, bau, dan kuman ringan.

Sebagian besar pakaian thrift cukup dicuci dengan mesin menggunakan detergen cair lembut agar kotoran dan bau hilang tanpa merusak serat kain. Gunakan air dingin, pilih detergen khusus bila perlu, dan aktifkan bilasan ekstra untuk menjaga kualitas terutama pada bahan sensitif seperti katun, wol, atau kain halus.

Beberapa jenis kain atau pakaian, seperti mantel, jas, sutra, wol, atau fur, tidak dapat dicuci dengan air dan harus dicuci kering (dry clean) untuk mempertahankan material dan strukturnya. Jika label pakaian menyatakan "Dry Clean Only" dan tidak yakin cara membersihkannya, kunjungi penatu lokal dan mintalah saran profesional. Metode ini

penting untuk menjaga bentuk dan kualitas pakaian yang rentan terhadap air.

Perawatan Khusus

Untuk kain halus seperti sutra dan wol, gunakan sabun mandi atau sabun bayi agar tidak cepat rusak. Sutra sebaiknya dicuci manual dengan air dingin dan sabun lembut, sedangkan wol cukup direndam, dibilas, lalu dijemur dengan benar agar bentuknya tetap terjaga.

Untuk jeans thrift, rendam di air hangat yang sudah diberikan cuka dan baking soda selama kurang lebih 30 menit. Campuran ini efektif menghilangkan bakteri dan kuman yang mungkin menempel. Hindari penggunaan air panas karena dapat merusak bahan, tekstur, dan warna jeans. Setelah perendaman, cuci dengan tangan menggunakan detergen, lebih baik yang mengandung antiseptik, untuk memastikan kebersihan maksimal.

Selesai melakukan pencucian, selanjutnya keringkan baju secara langsung di bawah sinar matahari. Menjemur pakaian secara langsung di bawah sinar matahari akan membuatnya lebih cepat kering. Sinar matahari juga berfungsi sebagai disinfektan alami yang dapat membantu mematikan kuman dan bakteri yang mungkin masih tertinggal. Saat menjemur, balik pakaian agar

tidak rusak atau pudar karena terpapar sinar matahari langsung.

Pengeringan pakaian dengan mesin pengering adalah salah satu faktor yang bisa merusak kualitas baju thrifting.

Langkah Akhir dan Tips Tambahan

Thrifting adalah membeli pakaian atau barang bekas layak pakai dengan harga murah. Setelah dicuci dengan detergen lembut, rendam baju dalam pewangi dan pelembut sekitar 30 menit agar wangi segar, bebas bau tak sedap, dan kain tetap lembut.

Jika sudah kering, setrika baju bekas thrift shop seperti biasa dengan suhu yang sesuai dengan bahan kainnya. Panas setrika dapat membantu melembutkan serat kain, membuat baju terlihat seperti baru kembali, dan membantu membunuh bakteri atau kuman yang mungkin masih tertinggal.

Selalu cuci tangan setelah menangani pakaian thrifting yang belum dicuci untuk mencegah penularan kuman. Gunakan sarung tangan jika perlu saat membersihkan pakaian yang sangat kotor atau berbau. Selain itu, mesin cuci yang kotor dapat memindahkan kotoran dan bakteri ke pakaian, jadi bersihkan mesin cuci secara teratur dengan menjalankan siklus kosong menggunakan cuka atau pembersih mesin cuci khusus. (nei,ist/dya)



Momentum Percepat ...dari hal 1

Pengamat politik, Ray Rangkuti, menyebut momentum saat ini sangat tepat untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset. "Pada periode ini, parlemen memang tengah melakukan agenda belanja masalah, sehingga tidak ada hambatan prosedural untuk menetapkan pembahasan RUU tersebut ke masa sidang II," katanya, Selasa (2/9/2025).

Ray juga mengatakan bahwa ukuran pertama keseriusan pemerintah dan DPR dalam menepati janji memberantas korupsi dapat dilihat dari langkah cepat menetapkan jadwal pembahasan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, penetapan jadwal tersebut menjadi titik awal penting untuk memastikan RUU strategis ini tidak kembali mandek seperti periode sebelumnya.

"Langkah pertama untuk melihat keseriusan janji tersebut adalah menetapkan jadwal rencana pembahasan RUU Perampasan Aset. Kapan akan dibahas dan kapan akan diselesaikan," ujarnya.

Ia mengingatkan agar percepatan proses legislasi tidak mengorbankan prinsip dasar pembentukan undang-undang. Menurutnya, asas keterbukaan, partisipasi publik, dan dialog yang sehat harus tetap menjadi pijakan utama. "Jangan sampai karena diburu waktu, kualitas substansinya diabaikan," tutur Ray dilansir media Indonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Sturman Panjaitan mengatakan pembahasan RUU Perampasan Aset sudah digelar pada Senin (1/9/2025), dan RUU tersebut kini masih berada dalam tahap penyusunan. "Kami bekerja semaksimal mungkin. Bahkan kemarin kita kan juga bahas. Hari Senin kemarin kita masuk juga," kata Sturman di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Dia mengatakan bahwa Baleg DPR RI akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RUU tersebut. Jangan sampai undang-undang yang dibentuk sangat jauh dari pemahaman masyarakat. "Karena masyarakat selalu diminta pendapatnya, diminta keinginannya apa. Kemudian kita jawab pertanyaannya," kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Di sisi lain, Sturman mengatakan bahwa RUU Perampasan Aset harus dirancang secara hati-hati karena menyangkut urusan pidana. Menurut dia, RUU tersebut tidak boleh tumpang tindih karena ada UU lain yang juga berkaitan dengan pidana.

"Undang-undang itu harus searah, sejalan. Supaya tidak berlawanan. Makanya kita harus perlu hati-hati," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Kholid

merespons tuntutan salah satu aspirasi yang disampaikan oleh demonstran terkait pengesahan RUU Perampasan Aset. Ia menegaskan dukungan penuh terhadap hal itu karena sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi Presiden Prabowo Subianto. Aturan itu dianggap bisa menjadi solusi atas maraknya korupsi yang terjadi di tanah air, sekaligus memastikan aset negara kembali untuk kesejahteraan rakyat.

"Korupsi bukan sekadar tindak pidana ekonomi. Ia adalah perampasan hak rakyat. Karena itu, penegakan hukum tidak cukup hanya menghukum pelaku, tetapi juga harus menjamin bahwa hasil kejahatan tidak bisa dinikmati oleh siapapun. RUU Perampasan Aset adalah solusi rasional, adil, efektif dan tegas untuk menutup ruang itu," ujar Kholid di Jakarta, Senin (1/9/2025).

RUU ini mengusung prinsip non-conviction based asset forfeiture, yaitu mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu vonis pidana. Prinsip ini memungkinkan negara untuk segera menyita harta hasil tindak pidana, meskipun pelakunya melarikan diri, meninggal dunia, atau lolos karena alasan teknis hukum.

Selain itu, RUU ini dilengkapi dengan mekanisme beban pembuktian terbalik terbatas, di mana pihak tertuduh maupun ahli warisnya wajib membuktikan bahwa harta yang mereka miliki bukan berasal dari tindak pidana. Seluruh proses akan dijalankan melalui peradilan khusus dengan mekanisme cepat, sehingga tetap menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum.

"Dengan cara ini, RUU Perampasan Aset bukan menambah masalah, melainkan menghadirkan solusi: adil bagi rakyat, tegas bagi tindakan pidana korupsi, dan efektif dalam proses penegakan hukum," jelas Politisi Fraksi PKS ini.

RUU ini secara komprehensif mengatur objek yang dapat dirampas, yaitu mulai dari harta hasil tindak pidana, harta yang digunakan untuk kejahatan, hingga harta hasil korupsi yang dialihkan kepada pihak lain. Pengelolaan aset rampasan akan dilakukan secara profesional dengan transparansi publik yang dijamin melalui mekanisme Pusat Pemulihan Aset (PPA), Kejaksaan, dan KPK.

Lebih jauh, pengesahan RUU ini akan menyelaraskan hukum Indonesia dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan standar Financial Action Task Force (FATF). Hal ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang serius dalam pemberantasan korupsi.

Ia menegaskan, dukungan terhadap RUU Perampasan Aset merupakan bagian dari komitmen politik dan moral untuk menjaga

integritas pejabat publik serta melindungi kepentingan rakyat.

"RUU ini bukan sekadar regulasi teknis. Ia adalah simbol keberanian negara untuk menegakkan keadilan, memastikan pejabat publik atau pejabat negara tidak menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya, dan mengembalikan kepada negara setiap rupiah yang menjadi hasil kejahatan korupsi. Karena itu, kami meminta RUU ini segera disahkan tanpa ditunda-tunda lagi," pungkash Kholid.

Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto berjanji mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset bersama DPR. Gani mengatakan janji itu disampaikan ketika Presiden menerima pimpinan serikat pekerja di Istana Negara pada Senin (1/9/2025).

Selain Gani, dalam pertemuan tersebut juga ada Presiden KSPI Said Iqbal, Ketua Umum KSPSI Juhur Hidayat, dan Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban. "Beliau berjanji yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas," ujar Andi Gani dilansir cncbincindonesia, Selasa (2/9/2025).

Dalam pertemuan itu, Gani menyampaikan dukungan penuh sekaligus sejumlah isu penting terkait nasib buruh dan pekerja di Indonesia. Ia menegaskan komitmen buruh untuk berdiri bersama Presiden Prabowo.

Gani juga menekankan bahwa dukungan tersebut disertai sikap tegas mendukung demonstrasi damai sekaligus menolak keras aksi anarkis yang berpotensi mengganggu stabilitas bangsa. "Kami menegaskan, kami bukan berada di belakang Presiden, kami berada di samping Presiden. Dan yang pasti, kami mendukung demonstrasi yang damai. Tetapi kami tegaskan, kami menentang perusuh-perusuh yang mencoba mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia," ucap Gani.

Sementara, Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan urgensi aturan ini agar segera disahkan. "RUU Perampasan Aset harus segera disahkan. Sudah hampir puluhan tahun, dan beliau tadi merespons sangat cepat sekali. (Presiden mengatakan) Tapi saya tidak bisa sendiri sebagai presiden, harus ada DPR dan partai politik," ucapnya.

Said Iqbal juga mengatakan bahwa demonstrasi tetap harus diberi ruang. Sebab, demonstrasi adalah saluran aspirasi rakyat kecil. Namun, Said menekankan aksi harus berlangsung tanpa kekerasan. "Tentu demonstrasi ini harus konstruktif, konstitusional, anti-kekerasan, dan tidak boleh anarkis. Dan pada titik itu Bapak Presiden setuju," kata Iqbal.

Said Iqbal menyebutkan, Presiden Prabowo merespons masukan perwakilan serikat pekerja secara positif. "Prinsipnya Pak Prabowo, termasuk dari pemuka agama, kawan-

kawan mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan juga beberapa kelompok lain yang diundang, merespons baik, bahkan suasana sangat cair," ujarnya.

Sekjen DPP PKS Muhammad Kholid menegaskan, pengesahan RUU adalah langkah strategis untuk melindungi uang rakyat dan memastikan pelaku korupsi tidak bisa menikmati hasil kejahatannya. "Negara harus hadir dengan aturan yang tegas, karena melawan korupsi membutuhkan instrumen yang tidak biasa," dikutip dari postingan Instagram resminya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa urgensi RUU bukan semata isu teknis hukum, melainkan langkah strategis menjaga amanah publik dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih.

Terpisah, Aliansi Cipayung yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) juga mendesak agar DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

"Undang-Undang tentang perampasan aset ini penting. Bahkan, mendesak untuk segera diberlakukan, karena perilaku korupsi oknum saat ini seperti sudah membumi dan perlu diberantas," kata juru bicara Aliansi Cipayung Bangkalan Rivaldi saat menggelar aksi damai di Kantor DPRD Bangkalan, Senin (1/9/2025).

Selain itu, Aliansi yang merupakan gabungan dari organisasi ekstra kampus ini menilai, jika undang-undang tentang perampasan aset diberlakukan, maka aparat penegak bisa melakukan penyelamatan uang negara yang dikorupsi oleh oknum pelaku korupsi secara legal.

Selama ini, sambung dia, penyelamatan uang negara hanya bisa dilakukan berdasarkan barang bukti yang disita. "Padahal, masih banyak di antara para terpidana korupsi selama ini yang hartanya belum disita negara, meskipun dari hasil korupsi. Karena itu, sekali lagi, undang-undang tentang perampasan aset sangat mendesak untuk segera diundangkan," katanya.

Sedangkan, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Benny K Harman mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), jika serius mendukung adanya aturan perampasan aset untuk memberantas korupsi.

Menurut dia, penerbitan Perppu bisa menjadi langkah konkret Prabowo untuk memenuhi janji politik, sekaligus menjawab tuntutan masyarakat yang mendesak percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. (rls,ant,ist/lut)



Pandangan Komisi DPRD Jatim terhadap Ranperda APBD Perubahan 2025 SOROTI ANGGARAN KETAHANAN PANGAN HINGGA EVALUASI TOTAL BUMD

SURABAYA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyampaikan sejumlah pandangan komisi terhadap Rencana Perda tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun Anggaran 2025. Rapat Paripurna digelar di Gedung DPRD Jawa Timur, Selasa (2/9/2025).

Dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim, Sri Wahyuni, forum paripurna ini ditegaskan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk pertanggungjawaban politik DPRD Jatim kepada masyarakat.

“Rapat paripurna hari ini untuk mendengarkan pandangan komisi di DPRD Jatim terhadap Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban politik sekaligus ikhtiar bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat Jawa Timur,” ungkap Sri Wahyuni.

Politisi Demokrat tersebut menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan kerja bersama antara eksekutif dan legislatif. Ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 serta revisinya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

“Posisi Kepala Daerah dan DPRD adalah mitra sejajar dalam



Suasana sidang Paripurna DPRD Jatim dalam Agenda Pembahasan Pandangan Komisi terhadap Perubahan APBD Jatim Tahun Anggaran 2025, Selasa (2/9/2025). (ist)

menjalankan roda pemerintahan atas dasar prinsip checks and balances. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan harus mencerminkan kepentingan publik,” imbuhnya.

Juru Bicara Komisi B DPRD Jawa Timur, Wiwin Sumrambah, menyoroti rendahnya proporsi anggaran bagi OPD mitra di sektor pangan, perdagangan, dan UMKM. Hasil pembahasan dan koordinasi menunjukkan bahwa alokasi anggaran hanya mencapai Rp1,68 triliun atau 5,1 persen dari total P-APBD 2025. Meski meningkat 9,48 persen dibanding APBD murni, angka tersebut dianggap belum cukup mendukung program swasembada pangan nasional.

Menurutnya, intervensi kebijakan yang lebih afirmatif sangat diperlukan agar Jatim benar-benar siap menjadi lumbung ketahanan pangan nasional. Ia mengingatkan kontribusi sektor-sektor di bawah OPD mitra Komisi B terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur mencapai 66,95 persen pada Triwulan II 2025.

Namun, masih banyak hambatan di lapangan, mulai dari keterbatasan SDM teknis, rendahnya pemahaman tentang

pertanian modern, hingga lemahnya manajemen sumber daya alam berkelanjutan. Anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut juga mengkritisi pola realisasi anggaran yang menumpuk di akhir tahun sehingga mengurangi efektivitas program.

“Pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada Triwulan II 2025 hanya 0,50 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun sebelumnya. Ini bukti bahwa ada masalah struktural yang harus segera dibenahi,” tuturnya.

Sementara itu, Komisi C DPRD Jatim melalui juru bicara Hartono menekankan pentingnya perbaikan kinerja BUMD sebagai salah satu motor penggerak ekonomi daerah. Menurutnya, BUMD harus berfokus pada core business masing-masing dan bertransformasi menjadi lebih produktif agar kontribusinya terhadap PAD semakin signifikan.

Ia juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh oleh Biro Perekonomian terhadap pengelolaan modal, manajemen internal, dan strategi bisnis BUMD yang belum optimal. Evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat kontribusi BUMD terhadap pembangunan Jatim.

Dalam pembahasan di tingkat komisi, target PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan disepakati naik menjadi Rp488,1 miliar, lebih tinggi dibanding usulan awal Rp474,4 miliar maupun target APBD murni Rp475,8 miliar. Kenaikan itu berasal dari kontribusi

sejumlah BUMD, seperti PT Air Bersih, PT Bank Jatim, PT BPR Jatim, PT PWU Jatim, PT JGU, PT PJU, dan PT SIER, sementara PT Jamkrida tetap stabil dan PT Askrida belum menyeter dividen karena regulasi OJK.

Politisi Partai Gerindra tersebut juga mengingatkan bahwa BUMD tidak boleh sekadar berorientasi pada dividen. “BUMD harus menjadi agen pembangunan. Tidak cukup hanya mencetak laba, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur,” tegasnya.

Selanjutnya, Komisi D DPRD Jatim menyampaikan dukungan terhadap Raperda P-APBD 2025 dengan catatan tambahan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk sejumlah OPD mitra. Juru Bicara Komisi D, Nurul Huda, menegaskan perubahan anggaran merupakan respons atas dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Ia menyoroti masih besarnya porsi belanja penunjang di beberapa OPD yang perlu dikelola lebih efisien. Bukan sekadar penghematan, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik dan pencapaian target RPJMD serta RKPD.

Komisi D juga menekankan pembangunan infrastruktur padat karya yang selaras dengan program swasembada pangan nasional 2029. Infrastruktur, kata Nurul Huda, harus diperluas hingga pelosok desa agar dapat mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya data akurat sebagai basis perencanaan. “Data adalah jejak untuk dipijak. Perencanaan program dan anggaran harus berdasarkan data faktual, baik dari BPS, musrenbang, maupun reses, bukan karena kedekatan dengan pihak tertentu,” tegasnya.

Politisi PPP itu juga memberikan perhatian khusus kepada Pulau Madura yang masih tertinggal dalam hal indeks pembangunan manusia (IPM) dan infrastruktur. (adv,pra/dya)

